

**REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD KABUPATEN
GUNUNGGIDUL TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN IV**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Selasa, 16 Desember 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Syalom,

Om swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Ykh. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul

Ykh. Segenap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

Ykh. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ykh. Hadirin, tamu undangan dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pengawasan Triwulan IV Tahun 2025.

Pimpinan Rapat yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

DPRD memiliki tugas fungsi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap triwulan tahun berjalan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas guna bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Berikut akan kami sampaikan hasil pengawasan DPRD Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Dasar Pengawasan

III. Maksud dan Tujuan

IV. Rekomendasi DPRD

V. Penutup

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul dihadapkan pada tantangan domestik, serta dinamika kebijakan nasional di Tahun 2025. Fokus masyarakat dan pemerintah tertuju pada transisi kepemimpinan, dan penyesuaian kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan dinamika penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat berdampak pada kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang mengusung **“Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut, Peningkatan Ekonomi; Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, Penanganan Stunting; Ketahanan Pangan; Peningkatan Kualitas SDM; Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; Ketentraman dan Ketertiban, dan Reformasi Birokrasi, harus menjadi agenda utama dan prioritas pengawasan kinerja pemerintah daerah karena menjadi kebijakan utama dalam pelaksanaan APBD dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi anggaran pada Triwulan IV menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025. Pada kesempatan ini, DPRD Kabupaten Gunungkidul menekankan agar serapan anggaran tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga sejalan dengan capaian kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan daerah.

Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, DPRD juga menegaskan pentingnya

percepatan realisasi proyek-proyek strategis daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan mampu meningkatkan daya dukung sarana-prasarana pelayanan publik yang hingga saat ini masih belum optimal.

II. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Rekomendasi DPRD dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah.

Adapun tujuan dari rekomendasi DPRD ini untuk memberikan saran, masukan dan atau koreksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel.

IV. REKOMENDASI DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 (TRIWULAN IV)

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja dalam masa pelaksanaan Triwulan ke-empat APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut ;

1. Terhadap permasalahan pengelolaan pemerintahan mulai dari kalurahan hingga pemerintah daerah masih banyak kendala, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan daerah agar pengelolaan pemerintah berjalan dengan lebih baik.
2. DPRD merekomendasikan agar Surat Edaran Bupati Nomor 19 Tahun 2024 dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dengan mengoptimalkan dan memprioritaskan penggunaan fasilitas lokal dalam melaksanakan ketugasan seperti penggunaan biro jasa lokal, berizin dan berdomisili di Kabupaten Gunungkidul.
3. Terhadap persoalan jalan menuju obyek wisata Gunungkidul banyak yang mengalami kerusakan, DPRD Kabupaten Gunungkidul merekomendasikan agar infrastruktur jalan menuju obyek wisata dilakukan perbaikan, sehingga semakin menarik wisatawan untuk berkunjung ke Gunungkidul.
4. Terhadap persoalan terdapat kendala penyerapan belanja karena fluktuasi anggaran dan keterlambatan kegiatan serta potensi kegiatan infrastruktur selesai namun pembayaran belum lunas menjelang akhir tahun. DPRD mendorong DPUPRKP melakukan optimalisasi perencanaan, percepatan proses pengadaan, dan mitigasi keterlambatan untuk tahun berikutnya.
5. Terhadap persoalan kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, DPRD Kabupaten Gunungkidul merekomendasikan pemerintah daerah agar melanjutkan redistribusi ASN ke wilayah terpencil dan memperkuat koordinasi antar jenjang sekolah untuk pemerataan guru.
6. Terhadap persoalan kekurangan SDM petugas kesehatan di Puskesmas dan Pustu, yang berpotensi menyebabkan pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal meskipun sudah ada bangunannya. DPRD Kabupaten Gunungkidul merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia secara detail

dan melakukan analisis beban kerja di setiap Puskesmas dan Pustu dan mengambil langkah konkrit untuk pendistribusian SDM kesehatan.

V. PENUTUP

Demikian penyampaian Rekomendasi Pengawasan DPRD Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan ke-empat dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama.

Terimakasih

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Gunungkidul, 16 Desember 2025

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul

Endang Sri Sumiyartini
Dra. Endang Sri Sumiyartini, M.A.P



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 13 / KPTS / 2025

TENTANG

REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN IV

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pembahasan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV telah menghasilkan rekomendasi yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rekomendasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN IV.
- KESATU : Rekomendasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 16 Desember 2025



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ENDANG SRI SUMIYARTINI

Tembusan :
Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai laporan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 /KPTS/2025
TENTANG

REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN IV

Kabupaten Gunungkidul kini dihadapkan pada fase akhir implementasi program pembangunan, serta dinamika penutupan tahun anggaran 2025 yang menuntut fokus dan komitmen tinggi dari seluruh elemen eksekutif maupun legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penyerapan anggaran, serta menuntaskan seluruh kewajiban kontrak dan capaian kinerja yang telah disepakati. Berpegangan pada kebijakan strategis yang meliputi Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul, Triwulan IV ini menjadi momentum vital untuk mengevaluasi secara holistik keberhasilan implementasi prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

Realisasi anggaran pada Triwulan IV menjadi tolok ukur penentu keberhasilan capaian tahunan. Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Gunungkidul menekankan agar sisa waktu yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga seluruh program dapat mencapai target fisik dan keuangan yang maksimal. DPRD memandang bahwa instrumen kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan harus dipertahankan, dan pada saat yang sama, perlu dilakukan audit kinerja untuk mengidentifikasi gap antara target dan realita. Dengan demikian, Laporan Pengawasan Kinerja Triwulan IV ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kualitas akhir pelayanan publik, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta kesiapan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa menjelang tutup tahun, sekaligus menjadi pijakan rekomendasi kuat untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya.

Berikut isu/permasalahan/hasil pengawasan Kinerja OPD pada masing-masing komisi:

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.	Masih terbatasnya jumlah pos pemadam kebakaran di Kabupaten Gunungkidul yang menyebabkan jangkauan pelayanan penanggulangan kebakaran belum optimal, terutama di wilayah yang memiliki jarak tempuh jauh.	1.A	DPRD merekomendasikan agar BPBD bersama perangkat daerah terkait menyusun peta kebutuhan dan rencana bertahap penambahan pos pemadam kebakaran, mengingat luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dan tingginya frekuensi kejadian kebakaran yang belum dapat ditangani secara optimal akibat keterbatasan jumlah pos dan unit armada pemadam kebakaran.
		2.	Penyebarluasan informasi mengenai titik-titik rawan bencana, khususnya di kawasan permukiman dan destinasi wisata, masih memerlukan penguatan agar risiko bencana dapat diminimalkan secara lebih efektif.	2.A	DPRD mendorong BPBD untuk terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam serta perluasan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait titik-titik rawan bencana, khususnya di kawasan permukiman dan destinasi wisata
		3.	Penanganan kekeringan di Kabupaten Gunungkidul masih cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek, dengan ketergantungan tinggi pada kegiatan dropping air bersih.	3.A	DPRD merekomendasikan agar BPBD bersama OPD teknis melakukan evaluasi kebijakan penanganan kekeringan yang selama ini masih bertumpu pada dropping air bersih. Perlu dirumuskan pendekatan jangka menengah dan panjang, seperti upaya penciptaan dan konservasi sumber mata air, pemanenan air hujan, serta penguatan infrastruktur air bersih, guna mengurangi ketergantungan pada dropping air.

2.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.	Masih banyaknya aduan publik tentang kenakalan remaja di berbagai wilayah di Gunungkidul yang meresahkan masyarakat.	1.A	DPRD mendorong pengembangan sistem pengaduan terpadu berbasis digital yang terintegrasi dengan kepolisian dan OPD terkait, sehingga penanganan aduan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan akuntabel.
				1.B	DPRD mendorong Satuan Polisi pamong Praja untuk meningkatkan jangkauan patroli yang ada di Gunungkidul
		2.	Pelaksanaan penegakan Perda, termasuk terkait reklame, PKL, peredaran minuman beralkohol, serta rokok ilegal, telah dilakukan melalui operasi bersama lintas instansi. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap batasan wilayah, ketentuan larangan, dan sanksi Perda masih belum merata,	2.A	DPRD merekomendasikan agar Satpol PP memperkuat strategi sosialisasi Perda yang kontekstual dan berbasis wilayah, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
				2.B	DPRD mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor (kepolisian, TNI, Bea Cukai, kejaksaan, dan OPD teknis) guna memastikan penegakan Perda berjalan konsisten, berkeadilan, dan memberikan efek jera yang proporsional.
		3.	Ketersediaan anggaran pengembangan SDM Satpol PP saat ini masih terbatas dan lebih difokuskan pada Satlinmas, sementara peningkatan kapasitas personel lainnya baru sebatas penyuluhan. Di sisi lain, kendaraan operasional dan	3.A	DPRD mendorong percepatan pemenuhan dan peningkatan sarana-prasarana operasional, termasuk kendaraan dan peralatan pendukung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, keselamatan personel, dan kesinambungan layanan ketertiban umum.
				3.B	DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul lebih memperhatikan alokasi

			sarana pendukung membutuhkan peningkatan kapasitas dan perawatan berkelanjutan		anggaran pengembangan SDM Satpol PP secara bertahap, khususnya untuk pelatihan teknis, penegakan hukum daerah, dan penanganan konflik sosial.
3.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.	Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas dan pemerataan kompetensi SDM yang memadai, khususnya dalam pengelolaan teknologi informasi, komunikasi publik, serta penguatan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).	1.A	DPRD merekomendasikan agar Dinas Kominfo menyusun rencana peningkatan kapasitas SDM yang terarah dan berkelanjutan, melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan berbasis kebutuhan riil program dan kegiatan.
				1.B	DPRD mendorong penguatan peran SDM Kominfo sebagai pembina dan fasilitator KIM, termasuk penyediaan dukungan teknis dan metodologis, guna meningkatkan efektivitas diseminasi informasi hingga tingkat masyarakat.
		2.	Sinkronisasi dan integrasi data antar-OPD masih menghadapi kendala, baik dari sisi sistem, tata kelola, maupun komitmen berbagi data, sehingga menghambat terwujudnya satu data daerah yang akurat dan mutakhir. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sarana pendukung, termasuk untuk pengembangan dan penguatan KIM, belum dimaksimalkan secara optimal.	2.A	DPRD merekomendasikan agar Dinas Kominfo memperkuat koordinasi dan regulasi teknis satu data daerah, termasuk penetapan standar data, mekanisme pembaruan, serta kewajiban OPD dalam penyediaan dan pemutakhiran data.
				2.B	DPRD mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi, termasuk dukungan sarana-prasarana bagi KIM, agar penyebaran informasi publik dan layanan digital pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan merata.
4.	BADAN KEPEGAWAIAN	1.	Adanya keresahan P3K terkait	1.A	DPRD merekomendasikan BKPPD untuk segera

	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		kejelasan besaran honor dan pertanyaan apakah P3K paruh waktu akan menerima gaji yang sama atau hanya sesuai dengan pos yang ada.		memberikan kejelasan dan sosialisasi yang komprehensif mengenai besaran dan mekanisme penggajian P3K, termasuk P3K paruh waktu, sesuai dengan peraturan perundangan dan kemampuan anggaran daerah.
		2.	Perkembangan Simpeg Gunungkidul dan rencana integrasi dengan sistem CASN (ASN Digital) dari BKN yang akan dilakukan secepatnya.	2.A	DPRD mendorong BKPPD untuk mempercepat proses integrasi Simpeg Gunungkidul dengan sistem CASN (ASN Digital) BKN pada tahun 2026 guna meningkatkan efektivitas tata kelola kepegawaian daerah.
5.	DPTR (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1.	Terdapat hambatan dalam pensertifikatan tanah kas kalurahan sebagai bagian dari penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan, yang disebabkan belum optimalnya tindak lanjut dari Kantor BPN Gunungkidul	1.A	DPRD mendorong DPTR meningkatkan koordinasi dan melakukan asistensi secara intensif dengan ATR BPN Gunungkidul untuk mempercepat tindak lanjut pensertifikatan tanah kas kalurahan.
				1.B	DPRD mendorong DPTR untuk berkoordinasi dengan BPN terkait supaya mempercepat penyelesaian sisa pembayaran ukur tanah/Surat Perintah Setor (SPS) yang masih banyak sisa, untuk mencapai target yang ditetapkan hingga akhir Desember (sekitar 88%)
6.	DPMKP2KB	1.	Pendampingan dan pembinaan kepada kalurahan masih bersifat insidental, belum dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur sesuai tingkat kerawanan masing-masing kalurahan.	1.A	Menetapkan pola pendampingan berjenjang dan periodik, sehingga setiap kalurahan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan dan tingkat permasalahannya, tidak bersifat insidental atau reaktif.
				1.B	Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pendampingan dan

					pembinaan kalurahan, agar pelaksanaan di lapangan berjalan seragam, terukur, dan berkelanjutan.
				1.C	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk menilai efektivitas pendampingan serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan sesuai dinamika permasalahan di kalurahan.
		2.	Penanganan berbagai kasus yang sering muncul di kalurahan (stunting, keluarga rentan, pernikahan anak, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengangkatan pamong) belum sepenuhnya merata dan terkoordinasi antarwilayah.	2.A	Menyusun sistem penanganan dan mediasi kasus yang terintegrasi antarwilayah, sehingga pola penanganan di setiap kalurahan memiliki standar yang sama dan tidak berjalan secara parsial termasuk evaluasi aturan penjarangan dan pengisian pamong.
				2.B	Melakukan pemetaan wilayah berbasis kasus, guna mengidentifikasi kalurahan dengan tingkat permasalahan tinggi sebagai prioritas intervensi dan alokasi sumber daya.
7.	DUKCAPIL	1.	Masih kurangnya ketersediaan sarana pendukung operasional Dukcapil, khususnya genset, menghambat kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.	1.A	DPRD mendorong Dukcapil untuk menyusun prioritas sarana dan prasarana operasional secara jelas, termasuk jadwal pengadaan dan pemeliharaan, agar kebutuhan operasional dapat terpenuhi secara efektif.
				1.B	DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi sarana prasarana kepada Dukcapil agar operasional kantor berjalan lancar dan pelayanan publik tidak terganggu.
		2.	Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap	2.A	Memperkuat sosialisasi secara masif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai

			pentingnya administrasi kependudukan masih bervariasi, khususnya terkait pelaporan kelahiran, kematian, pindah datang, dan perubahan status.		media (tatap muka, media sosial, baliho, dan media lokal) yang mudah diakses oleh masyarakat.
				2.B	Mengoptimalkan peran pemerintah kalurahan dan kapanewon, termasuk RT/RW, dukuh, dan kader masyarakat, sebagai ujung tombak edukasi dan pengingat pelaporan peristiwa kependudukan.
8.	KESBANGPOL	1.	Pengawasan dan pengendalian Ormas serta pencegahan radikalisme dan intoleransi belum berjalan optimal karena belum terstandar dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan aparat keamanan serta pemangku kepentingan terkait.	1.A	DPRD mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyusun dan menerapkan SOP pengawasan Ormas serta pencegahan radikalisme dan intoleransi secara terstandar dan terukur.
				1.B	DPRD mendorong penguatan sinergi dan koordinasi Bakesbangpol dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial.
		2.	Belum seimbang anggaran bantuan parpol antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/ Kota yang lainnya di DIY.	2.A	DRPD mendorong kenaikan anggaran bantuan politik bagi partai politik di Kabupaten Gunungkidul.
9.	INSPEKTORAT DAERAH	1.	Masih terdapat oknum di tingkat kalurahan yang terindikasi melakukan penyelewengan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menunjukkan	1.A	DPRD mendorong Inspektorat Daerah untuk memperkuat pengawasan di tingkat kalurahan secara berbasis risiko dan berkelanjutan.
				1.B	DPRD mendorong peningkatan pembinaan dan pendampingan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

			lemahnya pengendalian internal serta belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.		
10.	SEKRETARIAT DAERAH	1.	Capaian program dan kegiatan tahun 2025 belum sepenuhnya terfokus pada ketercapaian sasaran dan indikator kinerja RPJMD (seperti angka prevalensi stunting di beberapa daerah masih tinggi) Kabupaten Gunungkidul.	1.A	DPRD mendorong Sekretariat Daerah untuk memperkuat mekanisme koordinasi evaluasi capaian program pembangunan daerah yang terintegrasi dengan target dan indikator dalam visi misi Bupati maupun dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029.
				1.B	DPRD mendorong peningkatan pemantauan dan pelaporan berkala terkait capaian kinerja program pembangunan daerah oleh Sekretariat Daerah, agar hasil pelaksanaan triwulan dapat dibandingkan secara konsisten terhadap target RPJMD.
11.	SEKRETARIAT DPRD	1.	Masih banyaknya anggaran sekretariat DPRD yang belum terealisasi dengan baik	1.A	DPRD mendorong Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi internal terhadap penggunaan anggaran, sehingga setiap hambatan atau keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
				1.B	DPRD mendorong Sekretariat DPRD untuk mempercepat realisasi anggaran dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan agar anggaran terserap secara optimal.
12.	BKAD	1.	Realisasi belanja BKAD hingga	1.A	BKAD perlu melakukan percepatan pelaksanaan

			Triwulan IV (data 10 Desember 2025). sebesar 89% atau Rp 368.231.158.529,- Khusus serapan belanja bidang pengampu pendapatan Rp 39,8%		dan pebayaran program-kegiatan sesuai dengan ketentuan waktu/target
				1.B	BKAD perlu melakukan pengawasan yang tegas dan terukur terhadap pelaksanaan belanja dan penganggaran kegiatan-program secara internal maupun kerjasama pihak ketiga
				1.C	BKAD perlu melakukan evaluasi dan kajian pemetaan permasalahan/tantangan/potensi belanja selama pelaksanaan tahun anggaran 2025 sebagai catatan dan acuan pelaksanaan pembangunan tahun selanjutnya
		2.	Realisasi pendapatan BKAD masih cukup rendah dari target yang ditentukan sebesar 94,16% atau Rp,- hingga Triwulan IV (data 10 Desember). Rincian:	2.A	BKAD perlu melakukan monitoring, evaluasi dan pendekatan secara langsung kepada wajib pajak pada setiap obyek PBJT Hotel, PBJT Reklame, pajak parkir dan opsen PKB yang persentasenya masih di bawah 90% pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025
			PBJT Hotel: 88,30% PBJT Reklame: 83% Pajak Parkir: 83,6% Opsen PKB : 83,58%	2.B	Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pada para petugas pemungut pajak pada objek pajak yang capaiannya masih rendah
			Pajak Hiburan: 97,95% Pajak : 98,23% PBB-P2: 99%	2.C	BKAD perlu melakukan pendataan dan kajian potensi, serta pemetaan permasalahan secara keseluruhan objek pajak sebagai dasar pelaksanaan target dan potensi pajak Tahun selanjutnya
			Pajak Restoran: 101% Pajak Air Tanah: 105,18% Opsen BBNK: 105%	2.D	Pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian regulasi terkait mekanisme pemungutan yang lebih efektif dan optimal
				2.E	Meningkatkan sosialisasi pajak dimasyarakat yang melibatkan media sosial, media publikasi maupun turun langsung karena

					cukup efektif mengawal dan mengedukasi pemungutan pajak di masyarakat
				2.F	Mendorong kajian dan kebijakan daerah untuk meningkatkan NJOP pada kawasan ekonomi maupun JJS untuk meningkatkan nilai PBB-P2
				2.G	BKAD perlu mendorong teknik pemungutan dengan langsung penyetoran ke bank baik dari petugas pungut maupun masyarakat, salah satunya dengan melakukan penjadwalan pemungutan
				2.H	BKAD perlu mendorong mekanisme kontrol dan tindakan tegas pada pemungut pajak yang tidak berintegritas, baik dengan melibatkan Kerjasama pada pihak penegak hukum (Polisi/Kejaksaan/Inspektorat)
				2.I	Pemerintah perlu mendekatkan dan memperbanyak akses pembayaran pajak secara langsung oleh wajib pajak untuk mempermudah pembayaran pajak
		3.	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang per 30 November 2025 tertagih sebesar 1,8 m. • Masih banyak petugas tagih yang menggunakan uang PBBP2 untuk keperluan pribadi. • Masih tingginya tunggakan PBBP2 untuk perumahan. • Masih terdapat piutang PBB- 	3.A	BKAD perlu melakukan pendataan dan pemetaan piutang secara keseluruhan dan mengevaluasi piutang yang berpotensi untuk pendapatan, maupun piutang yang tidak dapat ditagihkan/diputihkan sehingga lebih terukur dan benar terkait pengkajian potensi pajak
				3.B	BKAD perlu Menyusun petugas pungut khusus piutang untuk melakukan konsentrasi/fokus pada potensi piutang pajak baik yang berada di wajib pajak maupun pada petugas pungut
				3.C	BKAD perlu membentuk kajian dan program terkait

			<p>P2 yang belum tertagih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesulitan dalam menanggapi PBB-P2 kepada sebagian ASN 		<p>sosialisasi, mediasi, penegakan dan penindakan piutang pajak kepada yang bersangkutan (pengelola dan wajib pajak) dengan koordinasi serta bekerjasama pihak terkait (BKAD, Inspektorat, Polri, Kejaksaan, KPK)</p>
				3.D	<p>Terhadap tunggakan PBB-P2 perumahan, BKAD perlu melakukan kajian pendataan dan regulasi dan program terkait otomatisasi pembayaran pajak dan KPR yang bisa dilakukan bersama sehingga dapat meminimalisir kebocoran/tunggakan pajak</p>
				3.E	<p>BKAD perlu berkoordinasi dengan petugas pungut lapang Kalurahan tempat perumahan untuk melakukan sosialisasi dan menjemput bola (pembayaran) secara langsung</p>
				3.F	<p>BKAD perlu melakukan kajian regulasi dan program mekanisme pembayaran langsung/ pemotongan gaji pada ASN maupun pegawai pemerintahan untuk pembayaran pajak PBB-P2 secara otomatis untuk mencegah kebocoran pajak dilingkungan pemerintahan</p>
				3.G	<p>Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak secara langsung maupun menggunakan media komunikasi/publikasi sebagai alat pengingat/informasi perpajakan</p>
				3.H	<p>BKAD mendorong koordinasi dan komunikasi secara langsung kepada pemungut pajak di Kalurahan yang mengalami</p>

					kesulitan penagihan kepada yang bersangkutan (wajib pajak ASN)
		4.	Adanya Keterbatasan SDM baik kualitas dan kuantitas, serta belum terpenuhinya penilai dan penyitaan di BKAD	4.A	BKAD perlu melakukan kajian dan pemetaan potensi serta kebutuhan sumberdaya manusia yang berkaitan perpajakan
				4.B	Pemerintah daerah perlu mendorong dan mengakomodir kebutuhan tim penilai dan penyitaan asset yang terukur untuk meningkatkan kinerja, efektifitas dan efisiensi perpajakan daerah
				4.C	BKAD perlu melakukan kegiatan pendidikan, latihan, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perpajakan baik petugas pengelola pajak, petugas pemungutan, petugas penegakan serta penindakan, dan seluruh sumberdaya manusia yang terkait
		5.	Masih rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap perilaku pembayaran pajak disetiap komponen pajak	5.A	Pemerintah perlu memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak secara langsung maupun menggunakan media sosial/ komunikasi/ publikasi sebagai alat pengingat/informasi perpajakan
				5.B	Pemerintah perlu melakukan promosi, pemasaran aktif melalui kerja sama dengan instansi, swasta maupun masyarakat terkait informasi perpajakan
				5.C	Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan transparansi data pajak baik penerimaan maupun menggunakan pajak agar masyarakat terbuka

					terhadap informasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap pembayaran pajak di daerah
				5.D	Pemerintah perlu mendekatkan dan memperbanyak akses pembayaran pajak secara langsung oleh wajib pajak untuk mempermudah pembayaran pajak
		6.	Pendapatan retribusi yang dikelola BKAD masih cukup rendah sebesar 77% hingga pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025	6.A	BKAD perlu pencatatan/ inventarisasi asset produktif Pemerintah Gunungkidul untuk melakukan pengkajian peningkatan retribusi
				6.B	Pemerintah perlu melakukan promosi dan pemasaran aktif melalui kerja sama dengan instansi, swasta maupun masyarakat
				6.C	Melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi secara terukur hingga akhir tahun, untuk melakukan optimalisasi pendapatan
				6.D	Pemerintah perlu memulai kajian terhadap pengembangan pemanfaatan asset daerah untuk kegiatan ekonomi produktif
		7.	Pendapatan kekayaan yang dipisahkan sebesar 85% hingga pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025	7.A	BKAD perlu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan pada seluruh bentuk usaha daerah sebagai kajian inventarisasi dan pengembangan ekosistem bisnis daerah
				7.B	Pemerintah perlu memulai kajian terhadap pengembangan pemanfaatan asset daerah untuk kegiatan ekonomi produktif, terutama pada kajian penambahan potensi Perusahaan daerah dibidang aneka usaha

13.	Dinas Pariwisata	1.	<p>Realisasi belanja Dinas Pariwisata hingga Triwulan IV (30 November) yaitu 74,92% atau Rp 9.485.387.616,-</p> <p>Terdapat pekerjaan yang berjalan, dan proses</p>	1.A	Mempercepat segala kegiatan pekerjaan Pembangunan, baik dari proses pelaksanaan maupun finishing (pembayaran) pekerjaan kegiatan secara tepat waktu
				1.B	Dinas Pariwisata perlu melakukan pengawasan yang tegas dan terukur terhadap pelaksanaan belanja dan penganggaran kegiatan-program
				1.C	Dinas Pariwisata perlu melakukan evaluasi dan kajian pemetaan permasalahan/ tantangan/potensi belanja selama pelaksanaan tahun anggaran 2025 sebagai catatan dan acuan pelaksanaan pembangunan tahun selanjutnya
		2.	<p>Realisasi pendapatan Dinas Pariwisata hingga Triwulan IV (Bulan 10 Desember) 67,61% atau Rp 25.495.000.000,- dan masih menyisakan target sebesar Rp 8 Milyar dengan pelaksanaan monev dari awal November hingga saat ini mencapai pendapatan yang cukup signifikan mencapai Rp 2,5 Milyar,</p> <p>Masih banyak kebocoran retribusi wisata pada wisatawan rombongan (menggunakan bus)</p>	2.A	Menghimbau dan mendorong para pengelola pariwisata untuk membentuk event secara mandiri sebagai kreativitas pengelola wisata dan keterlibatan langsung pengelola/mitra untuk melaksanakan promosi dan peningkatan jumlah pengunjung wisata di Gunungkidul
				2.B	Dinas Pariwisata perlu meningkatkan kegiatan-aktifasi promosi melalui media sosial dengan mengajak semua pihak baik pemerintahan, swasta maupun masyarakat
				2.C	Pemerintah melakukan koordinasi, sosialisasi, edukasi dan penindakan tegas dengan para pihak pelaku wisata/pelaku industry wisata untuk membayar retribusi pada loket resmi/TPR untuk mencegah kebocoran retribusi
				2.D	Pemerintah perlu mendorong semua pelaku di industry wisata untuk

					melakukan sapta pesona supaya menciptakan kenyamanan wisatawan
				2.E	Melakukan digitalisasi pembayaran menggunakan <i>e-ticketing</i> sebagai upaya mencegah kebocoran dan pemudahan akses pembayaran
				2.F	Melakukan kegiatan pengawasan/monev secara rutin dan secara tegas, dari awal tahun atau selama musim liburan secara berkala dan berkelanjutan untuk menunjukkan kehadiran pemerintah dan pengawasan
				2.G	Dinas Pariwisata perlu meningkatkan fokus pada pendataan, pengawasan, pengkajian dan pengembangan wisata/atraksi wisata
				2.H	Dinas Pariwisata perlu melakukan kajian terhadap regulasi, pengembangan pengelolaan dan Kerjasama pihak ketiga yang mendukung peningkatan PAD dari sektor pariwisata
		3.	Berkembangnya isu bencana dan cuaca ekstrem yang mengurangi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunungkidul	3.A	Koordinasi dengan Dinas Pariwisata DIY, Dishub dan BPBD melakukan titik yang rawan longsor
				3.B	Melakukan pers liris dan publikasi terkait keamanan yang telah terkonfirmasi dan diawasi oleh pihak terkait
				3.C	Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan kepada setiap pengelola, tempat wisata dan pihak terkait terkait peningkatan keamanan dan kesiagaan kawasan pariwisata di Gunungkidul, yang Sebagian besar berupa wisata alam
				3.D	Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi, sosialisasi dan kerjasama

					dengan berbagai pihak (Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pengelola Wisata, Biro Perjalanan, Kalurahan, dan Masyarakat) secara aktif melakukan pengawasan dan pengarahan jalur wisata yang aman baik secara langsung di lapang maupun lewat media sosial
		4.	Adanya kekurangan kendaraan Dinas Pariwisata Untuk lapangan 2 unit, untuk melakukan optimalisasi dan pengawasan retribusi	4.A	Dinas Pariwisata perlu melakukan pendataan, kajian sumberdaya dan anggaran terkait kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan disektor retribusi wisata
				4.B	Pemerintah daerah perlu melakukan anggaran dan mengakomodir kebutuhan mobilisasi Dinas Pariwisata untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja
		5.	Dominasi biro perjalanan wisata dari luar daerah mencerminkan masih rendahnya daya saing biro perjalanan wisata lokal Gunungkidul, meskipun daerah ini memiliki banyak destinasi wisata unggulan.	5.A	Pemerintah daerah dengan semua pihak dalam pemerintahan harus berkomitmen melakukan pengawasan, menegakkan dan penindakan aturan terutama SE No.19 Tahun 2024 sebagai upaya melindungi, optimalisasi ekonomi daerah, dan pengendalian biro perjalanan di Gunungkidul
				5.B	Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan pengawasan melalui sosialisasi, edukasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan biro perjalanan
				5.C	Pemerintah perlu mendorong dengan optimal iklim investasi promosi, dan keamanan usaha (dari kegiatan pungli/premanisme/harga /lingkungan) yang baik melalui Kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan peningkatan daya saing biro perjalanan (wisata) di

					Gunungkidul
				5.D	Pemerintah perlu mendukung sosialisasi dan pengawasan terhadap standarisasi harga, pelayanan, keamanan maupun SOP lain untuk menjaga iklim usaha dan ekosistem wisata di Gunungkidul tetap kondusif
14.	Dinas Perdagangan	1.	Realisasi belanja Dinas Perdagangan masih target yang ditentukan hingga Triwulan IV (tanggal 30 November) mencapai 84,5% atau Rp 11.363.916.980,-	1.A	Dinas Perdagangan perlu mempercepat segala kegiatan pekerjaan Pembangunan, baik dari proses pelaksanaan maupun finishing (pembayaran) pekerjaan kegiatan secara tepat waktu
				1.B	Dinas Perdagangan perlu melakukan pengawasan yang tegas dan terukur terhadap pelaksanaan belanja dan penganggaran program-kegiatan
				1.C	Dinas Perdagangan perlu melakukan kajian evaluasi terhadap potensi sumberdaya, permasalahan dan tantangan pelayanan dan penganggaran di tahun 2025 sebagai data acuan pelaksanaan Pembangunan tahun selanjutnya
		2.	Pendapatan Dinas Perdagangan masih dibawah capaian target yang ditentukan hingga Triwulan IV (tanggal 9 Desember 2025) mencapai 93,49% dan menyisakan target pendapatan sekitar Rp 300 juta	2.A	Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pasar sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat
				2.B	Dinas Perdagangan perlu melakukan evaluasi dan sistem/mechanisme kontrak dalam pemanfaatan pasar
			Pelayanan Pasar sebesar 93% kurang Rp 300 juta Pendapatan Parkir	2.C	Melakukan pemungutan di awal waktu pembukaan pelayanan pasar, untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan harian

		yang dikelola Dinas Perdagangan sebesar 92,6% hingga saat ini untuk pengelolanya masih memiliki komitmen Kerjasama Kendala: Pasar hewan Gunungkidul drop dan menyebabkan pendapatan <i>loss</i> yang tinggi diawal tahun	2.D	Dinas Perdagangan perlu mempertahankan agenda piket pada weekend (hari sabtu) untuk mencegah kebocoran pemungutan retribusi pendapatan
			2.E	Pemerintah daerah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang agar lebih adaptif terhadap tantangan pasar yang tradisional maupun berkembangnya digitalisasi media (pasar maupun keuangan)
			2.F	Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak/OPD terkait dengan ketat terhadap kesehatan hewan dan perkembangan penyakit hewan untuk mencegah penurunan pendapatan dari sektor pasar hewan
	3.	Struktur pengelolaan pasar yang dipegang 2 unit dinilai tidak efektif dalam pengelolaan pelayanan pasar	3.A	Pemerintah mendorong Dinas Perdagangan melakukan kajian dan evaluasi organisasi dan struktur fungsi pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perundangan
	4.	Penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dilakukan daerah masih cukup rendah. Dan beberapa komoditas (cabe) tinggi karena kondisi nasional	4.A	Pemerintah perlu melakukan peningkatan anggaran dan kegiatan operasi pasar terutama pada masa-masa peningkatan inflasi
			4.B	Pemerintah mendukung Dinas Perdagangan untuk melakukan pakta integritas terhadap pengusaha maupun pihak yang bekerjasama dengan penyelenggaraan operasi pasar dan pengendalian harga di wilayah Kabupaten Gunungkidul
			4.C	Pemerintah perlu secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah Lain dalam

				memenuhi pasokan dan pengendalian komoditas pangan
	5.	Kerusakan pasar tradisional akibat cuaca ekstrem disebabkan oleh faktor usia pasar dan menjadi salah satu pendorong	5.A	Dinas Perdagangan perlu melakukan pendataan, inventarisir dan evaluasi terhadap seluruh bangunan dan aset pasar di Kabupaten Gunungkidul, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan
			5.B	Pemerintah perlu segera melakukan penganggaran dan rehabilitasi pada bangunan dan komponen pelayanan pasar secara terukur untuk meningkatkan pelayanan, keamanan dan daya beli dipasar
	6.	Dinas Perdagangan perlu anggaran untuk reparasi timbangan dari program pengecekan/validasi timbangan pedagang	6.A	Pemerintah mendukung upaya Dinas Perdagangan melalui penganggaran dan kebijakan program reparasi timbangan dalam rangka peningkatan pelayanan pasar daerah
	7.	Belum akuratnya HET dengan kondisi harga di pasar	7.A	Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi pada seluruh pihak untuk memastikan sumber informasi yang akurat sebagai acuan HET
			7.B	Dinas Perdagangan bersama pihak terkait perlu melakukan Kerjasama pengawasan dan penindakan tegas terhadap kenaikan dan penurunan harga lapang yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Gunungkidul untuk mencegah permainan harga di masyarakat
			7.C	Pemerintah mendukung Dinas Perdagangan untuk melakukan pakta integritas terhadap pengusaha maupun pihak yang bekerjasama dengan

					penyelenggaraan operasi pasar dan pengendalian harga di wilayah Kabupaten Gunungkidul
15.	PDAM	1.	Keluhan masyarakat terkait kualitas dan kekurangan air, terutama di kawasan Selatan masih cukup tinggi. Beberapa titik daerah belum bisa menikmati pelayanan PDAM	1.A	Pemerintah perlu mendorong pelaksanaan kajian dan pemetaan terhadap pengembangan pelayanan PAM, baik yang berkaitan dengan potensi sumber air terutama bagian Selatan, pipanisasi, maupun teknologi pelayanan
				1.B	Pemerintah mendukung PDAM untuk melakukan pengembangan teknologi pelayanan air dengan acuan terukur, efektif, efisien dan mengutamakan kemanfaatan terhadap pelayanan kepada masyarakat
		2.	Masih lambatnya Progress usaha AMDK yang diselenggarakan PDAM pada tahap perijinan usaha	2.A	Pemerintah daerah perlu mendorong koordinasi, evaluasi dan melakukan pengawasan dengan tegas kepada semua pihak yang terlibat untuk mempercepat proses perijinan usaha dan pemasaran AMD
				2.B	PDAM harus melakukan kajian terhadap sumberdaya, permasalahan dan tantangan seluruh proses perijinan AMD sebagai acuan dan evaluasi menyeluruh kinerja di program-kegiatan selanjutnya
		3.	Penyertaan modal yang diberikan belum menampilkan hasil yang signifikan atau memberikan manfaat langsung kepada masyarakat	3.A	Perlu dilakukan kajian Analisis Biaya Manfaat Sosial sehingga dapat melihat manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat.
16.	BPD DIY	1.	Kondisi pembiayaan daerah:	1.A	Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan

			<p>Total OSL (<i>Outstanding Loan</i>) pengeluaran kredit yang dikelola di kantor cabang wonosari, Rp1,584 Trilyun per 30 November 2025 NPL 3,34% Net 1,68% Terkait pembiayaan pada UMKM/KUR total sekitar Rp335 Milyar KUR yang dibawah Rp 100 juta total Rp71 Milyar Pendapatan Deviden BPD DIY Cabang Gunungkidul sebesar Rp 11.335.344.960 Posisi Gunungkidul 5,14% penanaman modal, kekurangan modal Rp135 milyar</p>		<p>regulasi pembiayaan modal/permodalan mengingat komitmen pembiayaan terhadap BPD DIY masih jauh dari target yang ditentukan</p>
				1.B	<p>Mendorong pemerintah untuk melakukan disiplin dan konsistensi terhadap regulasi, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang telah ditentukan /perundangakan untuk meningkatkan nilai bargaining dan presentase daerah dalam perolehan deviden</p>
				1.C	<p>Mendorong BPD DIY untuk meningkatkan program kredit/pinjaman bunga lunak atau KUR untuk menysasar dan mendukung sektor ekonomi kecil dalam perdagangan/UMKM, pertanian, peternakan maupun perikanan</p>
				1.D	<p>Pemerintah daerah dan BPD DIY perlu secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat dan provinsi DIY untuk konsolidasi bantuan/subsidi kredit usaha masyarakat di Gunungkidul</p>
17.	Bank Daerah Gunungkidul (BDG)	1.	<p>Kondisi pembiayaan Bulan September BDG menyalurkan kredit sekitar Rp576 Milyar Banyak kredit digunakan untuk konsumsi sehingga penyaringan pengajuan kredit lebih ketat/selektif sehingga penyaluran kredit kurang terserap</p>	1.A	<p>Pemerintah perlu bekerjasama dengan BDG mendorong koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat di dunia usaha untuk melakukan sosialisasi pengkreditas usaha melalui kanal yang tepat, aman dan resmi</p>
				1.B	<p>Pemerintah bekerjasama dengan BDG perlu melakukan kegiatan konsolidasi/workshop usaha untuk memperluas ruang investasi dan</p>

		optimal di masyarakat		penyerapan kredit di lingkup pengusaha lokal Kabupaten Gunungkidul
			1.C	Mendorong BDG untuk melakukan promosi, sosialisasi dan edukasi kemudahan kredit baik melalui media sosial/publikasi maupun langsung bekerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD maupun kalurahan
	2.	Kondisi deviden yang diterima daerah per tahun 2025 sebesar Rp 4,6 Milyar dari penyertaan modal Rp122 Milyar hingga 2025 Kekurangan penyertaan modal Rp 17 Milyar hingga 2025 Setoran rencana deviden Tahun 2026, diangka Rp 5,050 milyar	2.A	melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi pembiayaan modal/permodalan mengingat komitmen pembiayaan terhadap BDG masih jauh dari target yang ditentukan
			2.B	Mendorong pemerintah untuk melakukan disiplin dan konsistensi terhadap regulasi, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang telah ditentukan /perundangakan untuk meningkatkan nilai bisnis daerah dan optimalisasi pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat dan daerah
	3.	Daya beli masyarakat menurun sehingga banyak posisi Lelang 2macet/lambat	3.A	Mendorong BDG untuk melakukan kajian appraisal secara terukur sesuai dengan kondisi perekonomian wilayah Gunungkidul
			3.B	Mendorong BDG untuk melakukan promosi dan informasi secara terbuka terkait kegiatan pelelangan dan kemudahan mekanisme pelelangan melalui berbagai media platform
			3.C	Mendorong dengan tegas terkait kebijakan dan kegiatan Lelang asset yang dilakukan BDG memprioritaskan masyarakat lokal dalam

					wilayah Gunungkidul
		4.	Inovasi Program kegiatan yang berdampak langsung pada Pengembangan M-banking di masyarakat masih rendah	4.A	Mendorong BDG untuk melakukan promosi dan edukasi secara masif terkait inovasi teknologi M-Banking dan kemudahan transaksi ke masyarakat luas/nasabah melalui berbagai media sosial/publikasi maupun kegiatan langsung dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah, DPRD, maupun Kalurahan
				4.B	Mendorong BDG untuk melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah untuk memperlus kegiatan dan platform Kerjasama melalui M-Banking BDG dengan inovasi kebijakan maupun kegiatan
				4.C	Mendorong BDG melakukan kajian evaluasi terhadap penyelenggaraan teknologi M-Banking baik potensi, permasalahan maupun tantangannya sebagai acuan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan di tahun 2026
		5.	Pemilihan pengurus masih kurang di tingkat pengurus dan direksi sedang dalam proses seleksi	5.A	Mendorong BDG untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah daerah terkait kebijakan, permasalahan dan kebutuhan untuk mempercepat proses pemenuhan sumberdaya manusia yang mendorong kinerja optimal BDG
				5.B	Mendorong BDG untuk melakukan kajian pemetaan sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan dan optimalisasi kinerja

18.	DPUPRKP	1.	Capaian pendapatan menjelang akhir tahun masih rendah (beberapa retribusi: alat berat 55,1%, rusun 77%,)	1.A	DPRD mendorong DPUPRKP untuk meningkatkan strategi optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan aset
				1.B	DPRD mendorong DPUPRKP agar segera meninjau regulasi terkait penghuni rusunawa dan koordinasi dengan OPD terkait dalam waktu dekat .
				1.C	DPRD mendorong DPUPRKP agar segera menyusun skema anggaran untuk penyusunan kajian potensi pemanfaatan Rusunawa bagi masyarakat non MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
		2.	Kendala penyerapan belanja karena fluktuasi anggaran dan keterlambatan kegiatan	2.A	DPRD mendorong DPUPRKP melakukan optimalisasi perencanaan, percepatan proses pengadaan, dan mitigasi keterlambatan untuk tahun berikutnya.
		3.	Terdapat potensi kegiatan selesai namun pembayaran belum lunas menjelang akhir tahun.	3.A	DPRD mendorong DPUPRKP agar memastikan penyelesaian seluruh tagihan sebelum tutup tahun anggaran.
		4.	Pembangunan Kelok 18 belum selesai (progres ±88 persen); jembatan masih dalam pekerjaan; target operasional Lebaran 2026	4.A	DPRD mendorong DPUPRKP agar memastikan seluruh pekerjaan fisik selesai sesuai dengan waktu dan standar yang telah ditetapkan
19.	Dinas Perhubungan	1.	Kebutuhan rambu dan papan petunjuk lalu lintas di sejumlah lokasi jalur wisata menjelang libur panjang Nataru	1.A	DPRD merekomendasikan percepatan penuntasan kebutuhan rambu dan papan petunjuk di jalur wisata menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta memastikan penggantian sparepart dan armatur LED dilaksanakan tepat waktu
				1.B	DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk

					meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pemeliharaan rambu dan papan penunjuk lalu lintas
		2.	Kebutuhan PJU di jalur pariwisata menjelang libur panjang Nataru	2.A	DPRD merekomendasikan agar Dishub memastikan kesiapan PJU di jalur pariwisata, termasuk ruas menuju pantai dan jalur utama, sebagai bentuk mitigasi risiko meningkatnya kunjungan wisatawan
				2.B	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi terkait pemeliharaan dan perbaikan PJU sesuai dengan kewenangan status jalan
		3.	Penumpukan kegiatan belanja di akhir tahun anggaran.	3.A	DPRD merekomendasikan agar Dishub meningkatkan manajemen waktu dan memastikan kualitas pekerjaan tetap terjamin menjamin
20.	Dinas Lingkungan Hidup	1.	Progres fisik Alun-alun Wonosari belum sepenuhnya selesai (drainase, tiang bendera, ringin, pot).	1.A	DPRD merekomendasikan DLH agar mempercepat penyelesaian seluruh item pekerjaan sesuai adendum kontrak.
		2.	TPAS Wukirsari mendekati batas kapasitas maksimal	2.A	DPRD merekomendasikan agar DLH mempercepat penyusunan rencana pembangunan TPST Baleharjo, termasuk skema kerja sama dengan pihak ketiga
		3.	Penguatan pengelolaan sampah dan keberlanjutan program bank sampah	3.A	DPRD merekomendasikan agar DLH meninjau kembali keaktifan fungsi dan kelembagaan program bank sampah dimasyarakat untuk menjamin program tidak stagnan dan dapat berlanjut.
21.	Dinas Kesehatan	1.	Banyak pustu tidak efektif beroperasi karena kurang tenaga; beberapa fasilitas mangkrak.	1.A	DPRD merekomendasikan Dinas Kesehatan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi pustu dan merencanakan

					rekonstruksi kembali pustu yang dibutuhkan
22.	PDAM Tirta Handayani	1.	Adanya penyertaan modal kepada PDAM pada APBD Perubahan	1.A	DPRD meminta PDAM membuat rencana pemanfaatan anggaran yang spesifik memuat nilai kebermanfaatannya bagi masyarakat , serta skema laporan yang akuntabel dan transparan atas modal yang disertakan.
23.	Dinas Pendidikan	1.	Realisasi anggaran telah mencapai 90,35% dengan serapan fisik 100%, namun masih terdapat pencairan yang belum selesai.	1.A	Pemerintah daerah agar mempercepat proses pencairan sisa anggaran dan memastikan penyelesaian kegiatan tepat waktu serta tepat mutu.
		2.	Selama tahun 2025, masih terdapat sekitar 120 sekolah SD dan SMP rusak, sementara perbaikan hanya mencakup 18 sekolah. Isu mengenai sekolah yang memerlukan perbaikan ini sangat penting untuk menunjang kualitas generasi bangsa.	2.A	Perencanaan tahun seanjutnya perlu menambah alokasi perbaikan sekolah per tahun yang lebih besar dan tepat sasaran dengan prioritas berdasar tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak.
		3.	Kekurangan tenaga pendidik sudah berkurang melalui penambahan ±700 P3K paruh waktu namun redistribusi ASN belum optimal.	3.A	Pemerintah daerah agar melanjutkan redistribusi ASN ke wilayah terpencil, memperkuat koordinasi antar jenjang sekolah untuk pemerataan guru.
		4.	Banyak PAUD masih bergantung pada dana kalurahan untuk operasional dan honor guru.	4.A	Pemkab perlu menyusun kebijakan pembiayaan PAUD berbasis kolaborasi APBD dan Dana Desa agar keberlanjutan layanan tidak tergantung

					kemampuan fiskal desa serta mempertimbangkan kenaikan SHBJ sesuai kemampuan keuangan daerah.
		5.	Atap baja ringan memiliki keterbatasan usia dan berpotensi ambruk dalam jangka waktu menengah.	5.A	Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan mutu konstruksi serta memastikan spesifikasi bahan bangunan sesuai standar teknis.
		6.	Sekolah dengan Kelas Khusus Olahraga (KKO) diminati namun baru ada empat sekolah di Gunungkidul yang memiliki KKO.	6.A	Perlu dukungan sarana olahraga dan pengembangan KKO secara bertahap melalui kemitraan dengan lembaga pembinaan atlet daerah.
24.	Dinas Perpustakaan dan Arsip (Urusan Perpustakaan)	1.	Layanan digitalisasi koleksi masih terbatas, belum semua koleksi buku dan dokumen tersedia secara daring melalui e-Pusda.	1.A	Pemerintah daerah perlu mempercepat proses digitalisasi koleksi dan memperluas akses daring e-Pusda agar masyarakat dan sekolah dapat memanfaatkan sumber belajar secara online.
		2.	Kemitraan literasi dengan sekolah dan komunitas masih belum optimal; kegiatan literasi belum menjangkau seluruh wilayah dan belum terintegrasi dengan program literasi sekolah	2.A	DPRD mendorong pembentukan pojok baca/mini library yang merata di sekolah dan kalurahan, serta peningkatan kolaborasi program literasi antara Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan, dan komunitas lokal.
25.	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (Urusan Tenaga Kerja)	1.	Realisasi anggaran urusan tenaga kerja baru 58,17% karena sebagian besar kegiatan padat karya masih berjalan.	1.A	Pemda perlu mempercepat pelaksanaan dan pelaporan program padat karya agar target penyerapan anggaran tercapai sebelum akhir tahun.
		2.	Minat warga untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) meningkat signifikan hingga	2.A	Dinas agar memperkuat kerja sama dengan BP2MI dan Disnakertrans DIY guna memastikan pembekalan, perlindungan hukum, dan pendampingan

			150 permohonan per September 2025.		PMI berjalan sesuai regulasi.
		3.	Program pelatihan kerja belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dunia industri modern.	3.A	Pelatihan kerja perlu diarahkan pada sektor-sektor adaptif seperti digital marketing, barista, dan otomotif, dilengkapi sarana modern termasuk mobil pelatihan keliling.
		4.	Masih terbatasnya data dampak pelatihan terhadap penyerapan tenaga kerja.	4.A	Dinas perlu menyusun evaluasi capaian pelatihan dan mengintegrasikan hasilnya dengan sistem informasi pasar kerja daerah.
26.	Dinas Kesehatan	1.	Hingga saat ini, dari target 386 Milyar PAD, tercapai 321 Milyar atau 83,37%. Dan Diharapkan bisa tercapai di akhir tahun.	1.A	Monitoring mingguan terhadap klaim yang masih "pending" atau dikembalikan oleh BPJS agar segera diperbaiki.
				1.B	Mendorong peningkatan layanan laboratorium, radiologi, rawat jalan/inap, dan persalinan.
				1.C	Pembentukan atau pengaktifan kembali Tim Percepatan PAD Dinas Kesehatan.
		2.	Melakukan Pengawasan dan Waspada terhadap Penyakit DBD	2.A	Meningkatkan surveilans kasus di puskesmas dan rumah sakit (pelaporan harian/ mingguan).
				2.B	Pelaksanaan Fogging ke lokasi yang tepat sasaran untuk membunuh nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dewasa di sekitar lokasi yang memiliki kasus DBD
				2.C	Melakukan kampanye berkala melalui media sosial, banner, dan edukasi kepada masyarakat
		3.	Penyediaan penawar bisa ular saat ini terbatas sehingga tidak tersedia hingga tingkat	3.A	Mengajukan permohonan penambahan distribusi antivenom melalui Kementerian Kesehatan.

			puskesmas.		
				3.B	Melakukan pelatihan tenaga kesehatan seluruh puskesmas guna penanganan terkait gigitan ular berbisa.
				3.C	Membuat <i>protokol rujukan cepat</i> saat terjadi gigitan ular dari puskesmas ke RSUD.
		4.	Kekurangan SDM kesehatan membuat puskesmas dan Pustu tidak berjalan maksimal walaupun sudah ada bangunannya.	4.A	Melakukan pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia secara detail dan melakukan analisis beban kerja disetiap puskesmas dan pustu.
				4.B	Melakukan redistribusi tenaga kesehatan dari puskesmas yang kelebihan SDM ke puskesmas/pustu yang kekurangan.
		5.	Terdapat peningkatan penyakit Ispa di Gunungkidul, yang terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah	5.A	Memperkuat pencegahan dan penanganan ISPA di masyarakat dan sekolah melalui penggunaan masker bagi yang bergejala, pemantauan kesehatan harian di sekolah dan juga masyarakat, serta koordinasi cepat antara puskesmas dan sekolah untuk mencegah penyebaran lebih luas.
		6.	Data Dinkes Gunungkidul menunjukkan peningkatan kasus HIV/AIDS sepanjang 2025. Saat ini tercatat 61 kasus baru, terdiri atas 52 kasus HIV dan 9 kasus AIDS.	6.A	Meningkatkan tes HIV dan penanganan cepat, dengan memperluas layanan skrining di puskesmas, memastikan pasien baru segera mendapat terapi ARV, serta mengencarkan edukasi pencegahan dan pengurangan stigma agar penularan dapat ditekan dan kasus tidak berkembang menjadi AIDS.
27.	RSUD WONOSARI	1.	Target pendapatan 82,5 Milyar tercapai 80 Milyar atau 97,68%. Belanja terealisasi 87,23%.	1.A	Memaksimalkan penagihan pendapatan yang tersisa serta mempercepat penyerapan belanja prioritas agar target program dapat tercapai secara optimal.

		2.	Pemenuhan SDM sebagai pendukung program layanan KJSU (kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi)	2.A	Mendorong pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan secara bertahap, terutama dokter spesialis dan tenaga penunjang, melalui rekrutmen, kerja sama dengan rumah sakit jejaring, dan pola penugasan terencana agar layanan KJSU dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.
28.	RSUD SAPTOSARI	1.	Pendapatan mencapai 11 Milyar, atau 84,79% dari target 14 Milyar dan diharapkan bisa tercapai di akhir tahun.	1.A	Memperkuat upaya penagihan dan optimalisasi sumber pendapatan pada triwulan akhir agar kekurangan target dapat dipenuhi tepat waktu.
		2.	Total belanja RSUD Saptosari mencapai 69%	2.A	Mempercepat realisasi belanja pada kegiatan prioritas dengan memperkuat koordinasi antar-unit dan memastikan proses administrasi berjalan lancar agar target kinerja dapat tercapai tepat waktu.
		3.	Terdapat kekurangan tenaga medis	3.A	Mengoptimalkan penugasan tenaga magang untuk menutup kekurangan sementara, sambil tetap mendorong pemenuhan formasi tenaga medis tetap agar pelayanan dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.
29.	Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan)	1.	Realisasi anggaran baru mencapai 86,17% dari target kabupaten sebesar 93,65%.	1.A	Dinas kebudayaan perlu mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. Fokus utama adalah memastikan kegiatan prioritas benar - benar menghasilkan output dan terserap optimal sebelum tutup tahun.

		2.	Masih banyaknya WBTB Gunungkidul yang belum memiliki sertifikat nasional karena pendataan dan verifikasi belum optimal.	2.A	Kundha Kabudayaan perlu mempercepat pendataan dan verifikasi WBTB dengan membentuk tim khusus, meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dan komunitas budaya, serta melengkapi seluruh dokumen pendukung sesuai standar nasional agar unsur WBTB Gunungkidul yang belum memiliki sertifikat dapat segera diajukan dan ditetapkan secara resmi di tingkat nasional.
30.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.	Program pengembangan dan pembinaan atlet olahraga sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan perolehan prestasi di Peparda maupun Porda, namun perlu dipastikan keberlanjutan kegiatan pembinaan atlet dan pemberian reward/apresiasi atas perolehan kejuaraan.	1.A	Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian reward/apresiasi kejuaraan kepada perorangan maupun grup yang berprestasi dan menyelenggarakan pembinaan atlet yang kontinyu dan berkelanjutan.
		2.	Pemberian bonus atlet dan pelatih yang semula tertunda karena realisasi medali melebihi target anggaran awal sehingga harus ada penyesuaian anggaran.	2.A	Dispora perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih adaptif dengan menyiapkan buffer budget untuk bonus prestasi, memperkuat koordinasi perencanaan dengan KONI dan NPCI,serta menetapkan mekanisme revisi anggaran yang cepat agar penyaluran bonus atlet dan pelatih tidak kembali tertunda ketika capaian medali melebihi target.

31.	DPMKP2KB (Urusan Keluarga Berencana)	1.	Metode kontrasepsi jangka pendek lebih diminati masyarakat daripada metode kontrasepsi jangka panjang.	1.A	Memberikan pelayanan KB MKJP dan sosialisasi serta penguatan KB MKJP kepada masyarakat melalui pengoptimalan kelompok masyarakat seperti posyandu, kelompok bina keluarga, KWT, Kelompok non formal.
		2.	Masih kurang optimalnya pelatihan pelaksanaan stok opname pada aplikasi SIRIKA - SIGA bagi fasilitas kesehatan yang sudah MOU dengan DPMKP2KB.	2.A	Harapannya fasilitas kesehatan yang sudah MOU dapat menggunakan dengan baik menu Stok Opname Aplikasi SIRIKA - SIGA untuk setiap bulannya, sehingga kedepan stock Alokon (alat dan obat kontrasepsi) Faskes yang tercantum di Aplikasi tersebut merupakan stock riil dan untuk pengiriman alokon bisa dilaksanakan secara otomatis tanpa adanya pengajuan dari faskes.
		3.	Pernikahan dini di Gunungkidul masih tinggi akibat rendahnya edukasi reproduksi dan lemahnya pengawasan keluarga, sehingga menimbulkan resiko kesehatan, putus sekolah dan beban sosial ekonomi.	3.A	Memperkuat edukasi kesehatan reproduksi melalui sekolah dan komunitas remaja, meningkatkan peran pendampingan keluarga oleh kader dan penyuluh KB, serta melakukan kolaborasi lintas sektor untuk pengawasan dan pencegahan pernikahan dini.
32.	Dinas Sosial P3A	1.	Masih terdapat Bansos yang belum tepat sasaran, sehingga menyebabkan kecemburuan di masyarakat	1.A	Pemutakhiran DTSen secara berkala, yang melibatkan pihak Padukuhan, Kalurahan serta SDM PKH.
		2.	Terdapat 2.397 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Gunungkidul yang terindikasi terlibat judol	2.A	Menindak tegas dan memberikan sanksi bagi penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online (judol)

		3. Edukasi masyarakat tentang Kekerasan pada Perempuan dan Anak serta TPPO masih kurang	3.A Memasifkan sosialisasi tentang kekerasan pada Perempuan dan Anak serta TPPO hingga ke tingkat Kapanewon dan Kalurahan
--	--	---	---



Gunungkidul, 16 Desember 2025

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul,

Dra. Endang Sri Sumiyartini, M.A.P.